

ABSTRAK

HILYATUL AULIA, NPM: 2022464, JUDUL: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT)”. Dibawah bimbingan Ibu **Ramona Handayani, S.Pd., M.A.** sebagai dosen pembimbing I dan Ibu **Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M.AP** sebagai dosen pembimbing II.

Pajak Alat Berat adalah bagian dari kebijakan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat fenomena masalah masih enggan melengkapi data serta melaporkan secara lengkap alat beratnya, tarif pajak dianggap tinggi karena dihitung dari NJAB yang tidak mengikuti turunnya harga pasar, serta belum ditegakkannya sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Alat Berat), serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 informan secara *purposive sampling*. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan cukup terimplementasi dengan baik. Dilihat dari indikator yang sudah terimplementasi yaitu: ukuran kebijakan, struktur, prosedur, mekanisme, pemahaman pelaksana, menerima/menolak pelaksana, dan lingkungan politik. Indikator yang cukup terimplementasi yaitu: sumber daya finansial, dan waktu. Dan indikator yang kurang terimplementasi yaitu: tujuan, sumber daya manusia, keterlibatan organisasi informal, pemahaman wajib pajak, menerima/menolak wajib pajak, komunikasi, koordinasi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial. Faktor pendukung yaitu: adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum yang sesuai, pembagian tugas dan bidang yang jelas antar pelaksana, dan kemauan petugas dalam melaksanakan peraturan daerah. Faktor penghambat yaitu: tidak adanya penambahan personel satpol pp dalam menunjang penegakan peraturan daerah, wajib pajak belum memahami isi dan ketentuan peraturan yang berlaku, belum ada kerja sama dengan instansi terkait, ketidakstabilan pendapatan perusahaan, dan pola pikir wajib pajak yang menghambat penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Saran kepada Kepala UPPD Barabai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Petugas agar meningkatkan pemahaman wajib pajak. Pimpinan perlu memperkuat koordinasi dengan instansi. Petugas perlu lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi wajib pajak. Petugas dapat meningkatkan dukungan sosial.

ABSTRACT

HILYATUL AULIA, Student ID: 2022464, Title: “Implementation of Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions at the Regional Revenue Service Unit Office (UPPD) Samsat Barabai, Hulu Sungai Tengah Regency (Case Study of Heavy Equipment Tax)”. Supervised by **Ramona Handayani, S.Pd., M.A.** as Supervisor I and **Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M.AP** as Supervisor II.

The Heavy Equipment Tax is part of the regional tax policy aimed at increasing Regional Original Revenue (PAD). Several problem phenomena were identified, including low taxpayer compliance, the perception that the Heavy Equipment Tax tariff is burdensome due to its calculation based on the Heavy Equipment Sale Value, and the lack of strict enforcement of sanctions against non-compliant taxpayers. This study aims to examine the implementation of the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions at the Regional Revenue Service Unit Office (UPPD) Samsat Barabai, Hulu Sungai Tengah Regency (Case Study of Heavy Equipment Tax), as well as the factors influencing its implementation.

This study employed a qualitative approach with a descriptive research type and a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources were obtained using purposive sampling involving 13 informants. Data analysis techniques included data condensation, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions at the Regional Revenue Service Unit Office (UPPD) Samsat Barabai, Hulu Sungai Tengah Regency (Case Study of Heavy Equipment Tax) has been fairly well implemented. Indicators that have been implemented include policy standards, organizational structure, procedures, mechanisms, implementers' understanding, implementers' acceptance or rejection, and the political environment. Indicators that are moderately implemented include financial resources and time. Meanwhile, indicators that are less well implemented include policy objectives, human resources, involvement of informal organizations, taxpayers' understanding, taxpayers' acceptance or rejection, communication, coordination, economic environment, and social environment. Supporting factors include the existence of appropriate regional regulations as a legal basis, clear division of duties among implementers, and the willingness of officers to implement the regulation. Inhibiting factors include the absence of additional Satpol PP personnel to support law enforcement, taxpayers' lack of understanding of the content and provisions of the regulation, the absence of cooperation with related institutions, unstable company income, and taxpayers' mindsets that hinder acceptance and compliance with the regulation.

Recommendations include improving human resource capacity at UPPD Samsat Barabai, enhancing taxpayers' understanding, strengthening coordination with related institutions, adopting more adaptive approaches to taxpayers' economic conditions, and increasing social support to improve compliance.